

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi kunci dasar dalam pembangunan suatu wilayah, dengan melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembangunan yang dilakukan dalam bidang pendidikan dapat berupa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan memberikan pemahaman mengenai cara agar tetap *survive* serta menjadi *generator* atau penggerak dalam melakukan perubahan. Untuk meminimalisir kegagalan dalam membangun suatu negara atau wilayah, dibutuhkan investasi pendidikan.

Menurut Soelaiman (2014, hlm. 4) menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang bersifat wajib dalam membangun bangsa dan menjadi hak bagi setiap warga negara. Dia mengatakan bahwa:

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat tercapai melalui pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar manusia dan menjadi salah satu wadah bagi seseorang untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Langeveld (dalam Engkoswara dkk., 2010, hlm. 5) mengemukakan bahwa “Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada

Dewi Septiyani, 2018

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP RATA-RATA
LAMA SEKOLAH DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Dengan kata lain, membimbing anak mencapai kedewasaan.”

Berdasarkan pada definisi diatas pada definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dalam bentuk bimbingan atau pertolongan dari orang dewasa kepada anak agar memiliki kecakapan dalam bermasyarakat.

Tujuan pemerintah dalam bentuk pembangunan pendidikan selaras dengan visi dan misi Presiden Jokowi yaitu Nawacita. Visi dan misi tersebut terkandung pada bagian kelima dengan, yaitu (Hoelman dkk, 2015, hlm. 18):

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan; Program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat; Serta Indonesia Kerja dan Indonesia sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.

Berdasarkan pada definisi pendidikan menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatas terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) usaha sadar dan terencana; (2) kekuatan spriritual keagamaan; (3) pengendalian diri; (4) kepribadian; (5) kecerdasan; dan (6) akhlak mulia.

Usaha yang terencana dalam pendidikan salah satunya dengan membentuk program wajib belajar. Di Indonesia masih banyak terdapat masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan wajib, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerataan akan proses pendidikan ketika proses implementasi. Dengan kurang meratanya proses implementasi akan menjadi pengahambat dalam pembangunan dan peningkatan taraf hidup manusia. Pendidikan memberdayakan manusia yang erat hubungannya dengan aspek-aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, politik, demografi dan lain sebagainya.

Dewi Septiyani, 2018

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Salah satu cara untuk mengukur seberapa besar pembangunan yang terjadi di suatu wilayah atau negara adalah dengan melihat kepada Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran dalam melihat seberapa jauh masyarakat dapat mensejahterahkan kehidupan mereka dengan memilih pada jalurnya masing-masing. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2016 sebesar 70.18, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan capaian besar bagi Negara Indonesia yang termasuk dalam golongan tinggi, namun di beberapa daerah masih memiliki IPM yang tergolong rendah. Dengan adanya Indeks Pembangunan Manusia dapat menggambarkan mengenai kondisi perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* memiliki terdapat variabel yang menunjang, yaitu (1) Angka Harapan Hidup; (2) Rata-Rata Lama Sekolah; dan (3) Angka Harapan Lama Sekolah. Dengan variabel tersebut akan tergambar mengenai kondisi pendidikan disuatu daerah.

Dalam publikasi BPS mengenai Indeks Pembangunan Manusia 2015 menyatakan bahwa (Publikasi IPM 2015, 2015, hlm. 11):

“Jika dikaitkan kembali antara konsep pembangunan yang masih konvensional dengan pembangunan manusia, kedua konsep tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Konsep klasik pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah (dual causation) (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000), dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun disisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Constantini V. dan M. Salcatore (2008) mengemukakan bahwa pertumbuhan pembangunan manusia yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.”

Dewi Septiyani, 2018

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan Indonesia, hal tersebut terlihat dari jumlah penduduk yang dominan dibanding dengan wilayah lainnya. Merujuk pada data BPS bahwa rata-rata lama sekolah pada Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 8.46 tahun, angka tersebut termasuk kedalam golongan rendah yang artinya rata-rata masyarakat menempuh pendidikan hingga pada tingkat Sekolah Menengah Pertama kelas 2. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Sama halnya dengan rata-rata lama sekolah di Indonesia yang tidak jauh berbeda pada tahun 2017 sebesar 8.5 tahun. Pemerintah selama lima tahun terakhir berusaha mencapai target yang berdasarkan RPJMN bahwa tahun 2019 Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8.8 tahun. Hal tersebut terlihat pada meningkatnya rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir yang terus meningkat.



*Gambar 1.1 Perbandingan RLS
Sumber diolah kembali dari BPS*

Pembangunan manusia tidak akan lepas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat terlihat dari tingkat daya beli masyarakat dan pendapatan yang didapat pada suatu wilayah. Pendapatan per

Dewi Septiyani, 2018

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kapita Provinsi Jawa Barat 1,275,546.48 miliar pada tahun 2016, sedangkan untuk jasa pendidikan memiliki pedapatan sebesar 2,7 % dari keseluruhan. Di Indonesia PDB pada tahun 2016 sebesar 9,433,034.40 miliar. Selama tiga tahun berturut-turut terus mengalami peningkatan yang membuktikan bahwa daya beli serta kebutuhan masyarakat semakin bertambah. Dengan terus meningkatnya daya beli masyarakat dapat memberikan gambaran bahwa pembangunan manusia semakin baik. Berikut peningkatan PDRB selama tiga tahun berturut-turut.



*Gambar 1.2 Perbandingan PDRB
Sumber diolah kembali dari BPS*

Terdapat penelitian yang relevan mengenai rata-rata lama sekolah, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat oleh Tri Ernawati (2013). Penelitian tersebut menggunakan data panel dengan 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan runtut waktu dari tahun 2008 hingga 2010. Dengan menggunakan variabel lama sekolah sebagai variabel dependen dan variabel independen terdiri dari tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan tempat tinggal. Berdasarkan hasil kajian tersebut menyatakan bahwa tingkat kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap lama

Dewi Septiyani, 2018

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

sekolah, begitu pun dengan variabel beban ketergantungan dan tempat tinggal tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap lama sekolah. Namun secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kemiskinan, beban ketergantungan, dan tempat tinggal terhadap lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iik Nurulpaik (2011) mengenai studi deskriptif pencapaian indek pendidikan dalam komposit IPM Jawa Barat tahun 1993-2006. Pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pencapaian komposit IPM di Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia yang dikaji pada penelitian tersebut merupakan indek pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan wajib belajar pendidikan dasar. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis *forecasting* dengan teknik proyeksi dan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan resmi oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dan nonperkotaan, hal tersebut dilihat dari pencapaian rata-rata lama sekolah di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa perlakuan pembangunan masih belum merata.

Berdasarkan pada paparan diatas perlu adanya penelitian yang membahas mengenai hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam sektor pendidikan. Maka dari itu peneliti mengambil judul Pengaruh PDRB terhadap Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas terdapat rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana kondisi PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016?
2. Bagaimana kondisi Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016?

Dewi Septiyani, 2018

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana Pengaruh PDRB terhadap Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang diatas terdapat rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui PDRB di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui Pengaruh PDRB terhadap Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB terhadap Rata-rata lama sekolah dalam kaitannya dengan sektor pendidikan diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai bahan kajian untuk mengklarifikasi temuan-temuan atau hasil-hasil penelitian terdahulu terutama penelitian-penelitian mengenai pengaruh PDRB terhadap rata-rata lama sekolah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan sebagai berikut dapat memberikan sumbangan berupa bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintahan yang melakukan pengambilan keputusan untuk kebijakan pendidikan yang bersifat makroskopik dan mesoskopik.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam mempermudah penulisan skripsi, dibutuhkan struktur organisasi skripsi agar tersusun secara sistematis dan mudah. Maka dari itu, peneliti dalam membuat struktur organisasi skripsi mengacu pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun Akademik 2016 (Rektor, Indonesia, Penulisan, & Ilmiah, 2016), adapun struktur organisasi skripsi yang digunakan peneliti sebagai berikut:

Dewi Septiyani, 2018

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI PROVINSI JAWA BARAT 2012-2016

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang perkenalan mengenai masalah yang akan diangkat oleh peneliti. Struktur organisasi pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka, berisi mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti peneliti. Struktur organisasi pada bab ini yaitu teori yang relevan dengan konteks penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan kerangka berpikir penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, yang berisi tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Struktur organisasi pada bab ini terdiri dari desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan, bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.